

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

INKESRA

Kabupaten Cilacap

2024



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

INKESRA

Kabupaten Cilacap

2024

<https://cilacapkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN CILACAP**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP 2024

Katalog : 4102004.3301

Nomor Publikasi : 33010.24061

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah halaman : xx + 46 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap 2024

Pengarah

Isnaini, SST, MM

Penanggung Jawab

Suwarno, SST

Penyunting

Ukhti Winar S., SST., M.E.K.K

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Lulu Lestari, SST

Yuffie Dwi Azmi H.,A.Md

Penata Letak

Lulu Lestari, SST

Yuffie Dwi Azmi H.,A.Md

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap 2024 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap yang didalamnya membahas tentang kondisi terkini kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut meliputi aspek: kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan kemiskinan. Data yang digunakan berasal dari survei-survei BPS dan data dari instansi lain yang terkait. Publikasi ini diharapkan mampu digunakan sebagai salah satu acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kesejahteraan masyarakat Cilacap kedepan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap 2024 memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Cilacap, Desember 2024
Kepala BPS Kabupaten Cilacap



Isnaini, SST, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	V
Daftar Isi	VII
Daftar Gambar	IX
Daftar Tabel	XI
Daftar Infografis	XIII
KEPENDUDUKAN CILACAP	1
JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN	1
PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK	3
ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN	5
WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA	6
PENGGUNAAN ALAT/CARA KB	7
KESEHATAN & GIZI CILACAP	9
DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK	9
TINGKAT IMUNITAS DAN GIZI BALITA	10
PEMANFAATAN FASILITAS KESEHATAN	13
PENDIDIKAN CILACAP	17
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	18
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH	20
KETENAGAKERJAAN CILACAP	23
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	24
LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS PEKERJAAN	26

PEKERJA MENURUT USIA	27
TARAF & POLA KONSUMSI CILACAP	29
PENGELUARAN RUMAH TANGGA	29
KONSUMSI KALORI DAN PROTEIN.....	32
PERUMAHAN CILACAP.....	35
GAMBARAN PERUMAHAN DI INDONESIA	35
KONDISI FISIK BANGUNAN.....	36
FASILITAS PERUMAHAN	39
STATUS KEPEMILIKAN RUMAH	40
KEMISKINAN CILACAP.....	43
PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN	43

<https://cilacapkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap, 1980-2020	2
Gambar 1.2 Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur di Kabupaten Cilacap pertengahan tahun 2024	3
Gambar 1.3 Kepadatan penduduk Kabupaten Cilacap (jiwa/km ²), 2019-2024 ...	4
Gambar 1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama Tahun 2023	7
Gambar 2.1 Angka kesakitan dan persentase penduduk rawat jalan dengan jaminan kesehatan di kabupaten Cilacap tahun 2023-2024.....	10
Gambar 2.2 Persentase penduduk berumur 0-59 bulan menurut cakupan imunisasi di Kabupaten Cilacap, 2023-2024	12
Gambar 2.3 Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat dan klasifikasi wilayah di Kabupaten Cilacap, 2022-2023	14
Gambar 3.1 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Cilacap tahun 2022-2023..	18
Gambar 3.2 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut klasifikasi wilayah dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Cilacap tahun 2023	19
Gambar 4.1 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2022-2023	25
Gambar 4.2 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022-2023.....	26
Gambar 4.3 Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022 dan 2023.....	27
Gambar 5.1 Proporsi pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Cilacap, 2021-2023.....	31
Gambar 5.2 Distribusi pembagian pengeluaran per kapita di Kabupaten Cilacap, 2019-2023	32

Gambar 6.1 Persentase jenis atap rumah di Kabupaten Cilacap, 2024.....	36
Gambar 6.2 Persentase rumah menurut jenis dinding di eks Karesidenan Banyumas 2024	37
Gambar 6.3 Persentase rumah berlantai layak di eks Karesidenan Banyumas 2022-2024	38
Gambar 6.4 Status kepemilikan rumah berdasarkan tipe wilayah di Kabupaten Cilacap tahun 2023-2024	41
Gambar 7.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap tahun 2020-2024	40
Gambar 7.2 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten Cilacap, 2020-2024	45

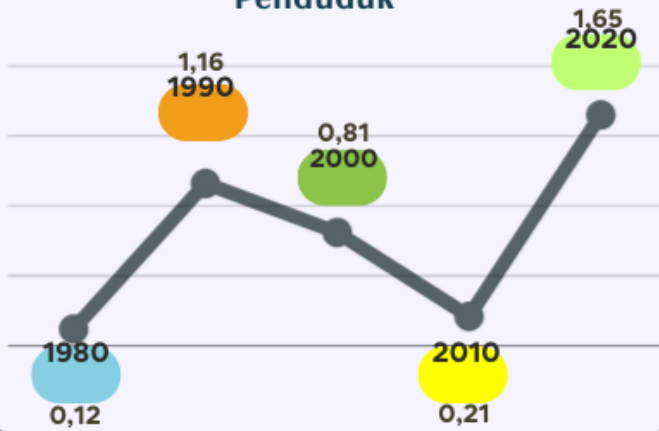
<https://cilacapkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

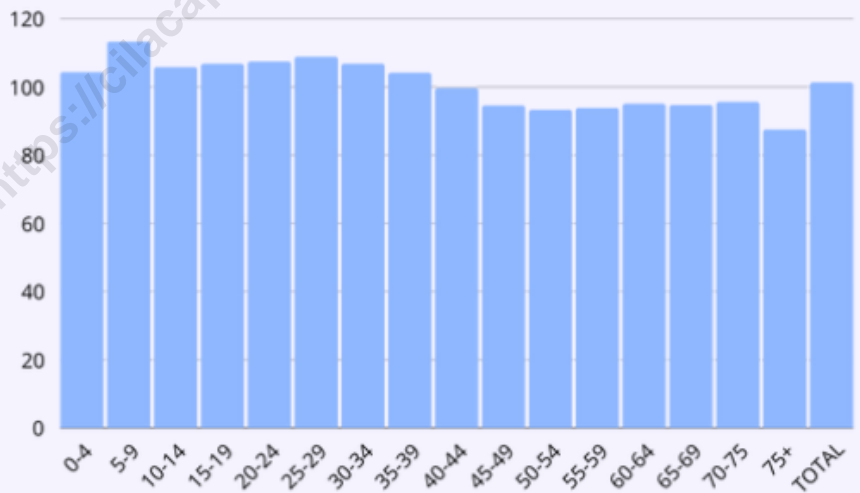
Tabel 1.1 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2018-2022..	5
Tabel 1.2 Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara kontrasepsi menurut daerah tempat tinggal dan alat/cara kontrasepsi yang digunakan di Kabupaten Cilacap, 2020-2022	8
Tabel 2.1 Persentase Anak Kurang dari Dua Tahun yang Pernah diberi ASI dan Lamanya Disusui di Kabupaten Cilacap Tahun 2024	11
Tabel 3.1 Rata-rata lama sekolah (tahun) dan harapan lama sekolah (tahun) di Kabupaten Cilacap, 2021-2023.....	16
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah menurut usia sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022-2023.....	20
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut usia sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022-2023	21
Tabel 4.1 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022-2023	28
Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per kapita menurut jenisnya di Kabupaten Cilacap, 2021-2023	29
Tabel 5.2 Konsumsi energi dan protein per kapita per hari menurut daerah tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, 2021-2023	33
Tabel 6.1 Persentase rumah tangga menurut luas lantai per kapita di eks Karesidenan Banyumas 2024	38
Tabel 6.2 Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan di Kabupaten Cilacap tahun 2023-2024	40

PENDUDUK CILACAP 2024

Pertumbuhan Penduduk



Rasio jenis kelamin per kelompok umur

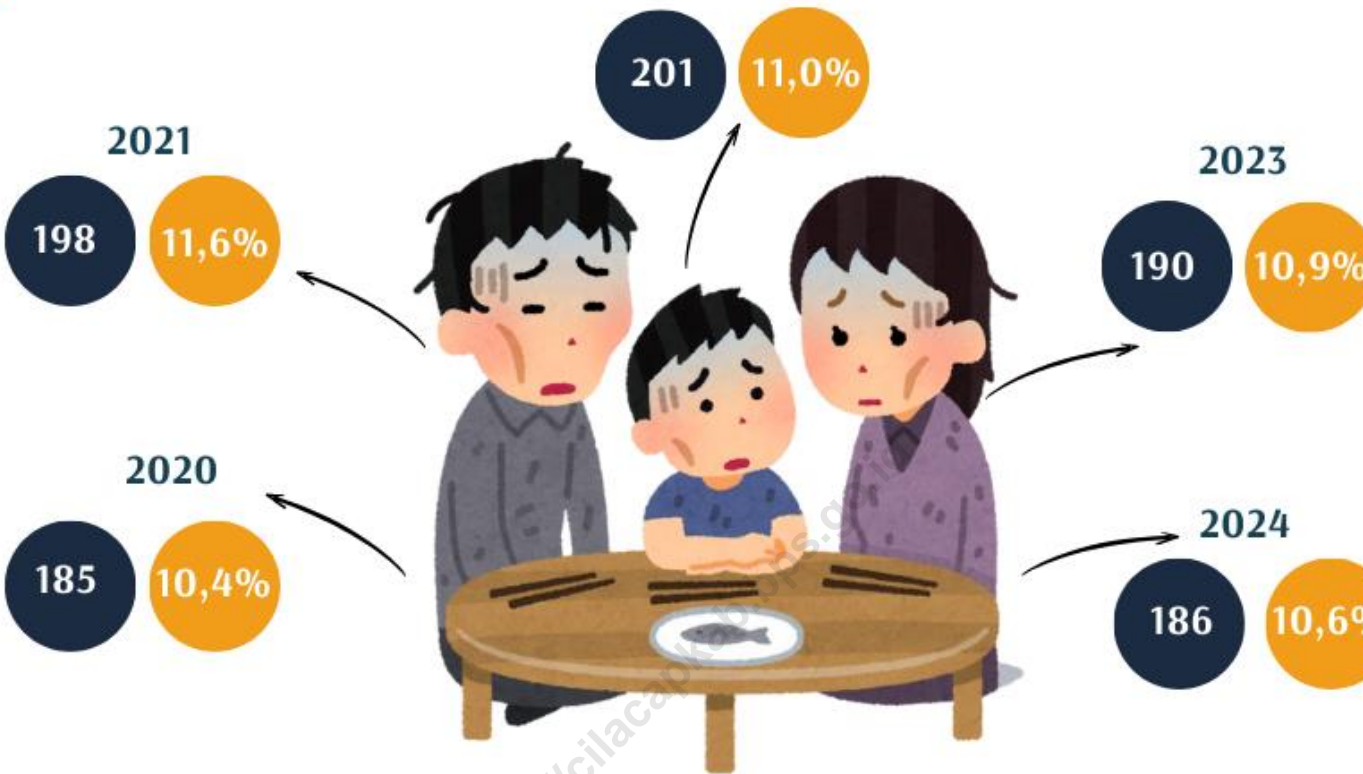


Kepadatan Penduduk : 872 jiwa/km²



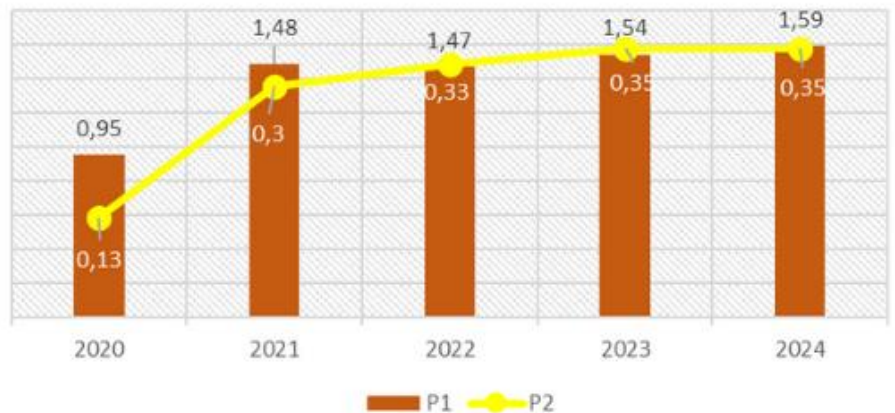
Angka Beban Ketergantungan
45,30
100 orang produktif menanggung 45 orang tidak produktif

KEMISKINAN KABUPATEN CILACAP



- Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
- Presentase Kemiskinan

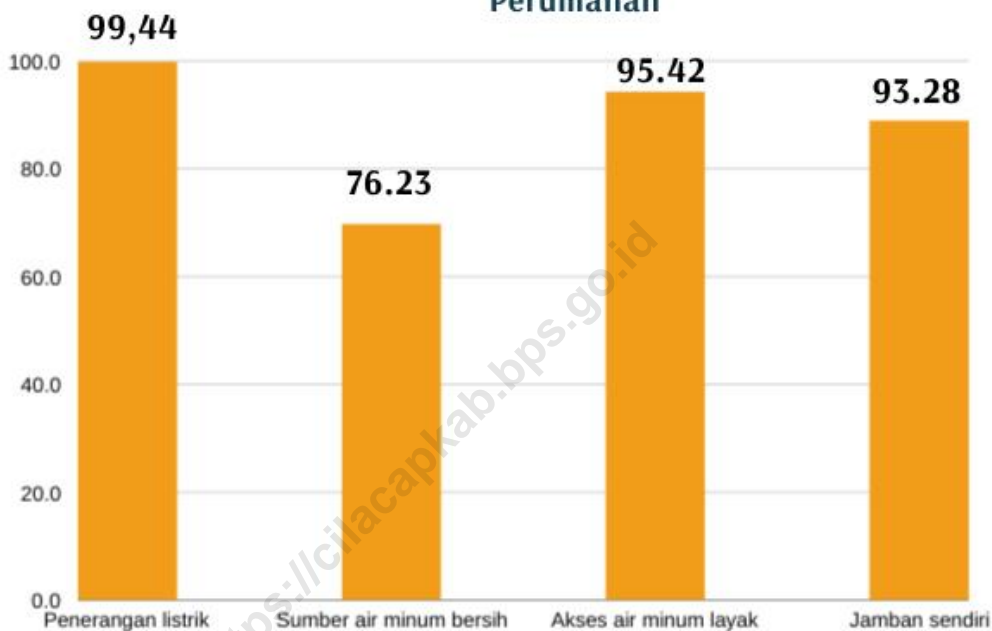
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2020-2024



PROFIL PERUMAHAN DI KABUPATEN CILACAP 2023



Presentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan



80,46% Rumah Menggunakan Atap Genteng



85% Rumah Menggunakan Dinding Tembok

98% Rumah Berlantai Layak

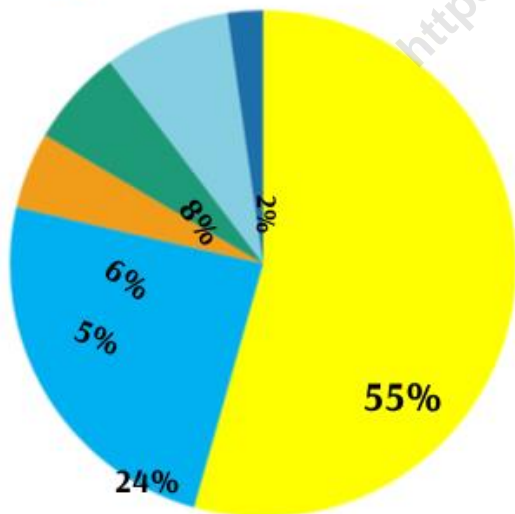


TARAF DAN POLA KONSUMSI MASYARAKAT CILACAP 2023

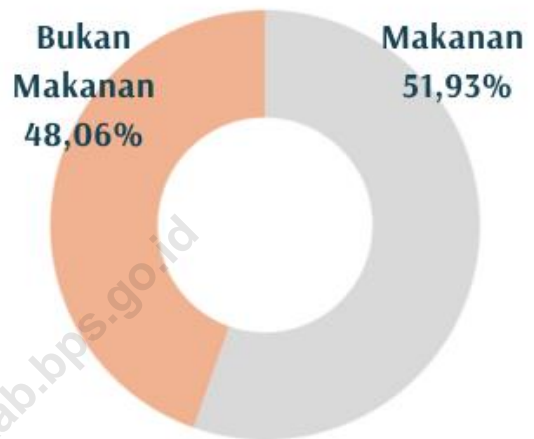


Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Non-Makanan

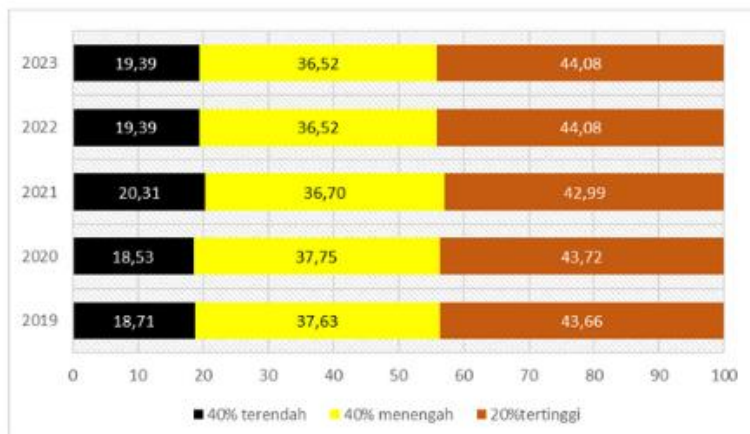
- Perumahan dan fasilitas rumah tangga
- Aneka barang dan jasa
- Pakaian, alas kaki dan tutup kepala
- Barang tahan lama
- Pajak, pungutan, dan asuransi
- Keperluan pesta dan upacara/kenduri



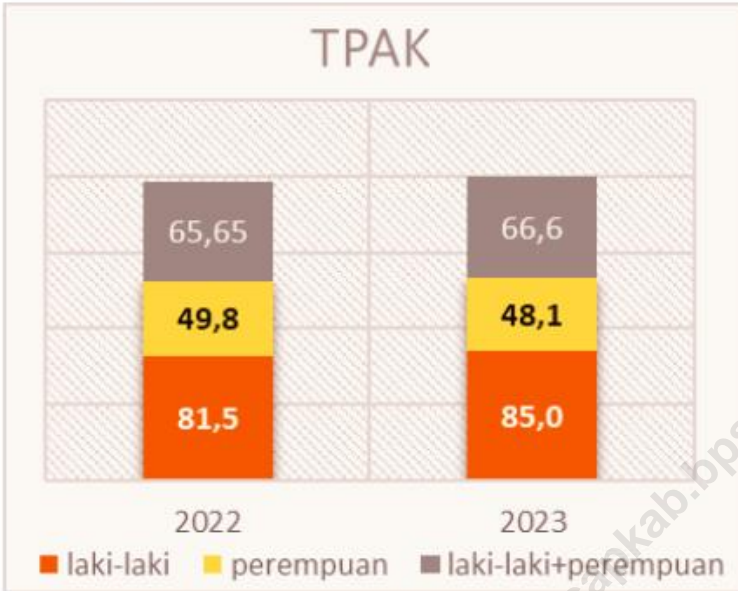
Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga



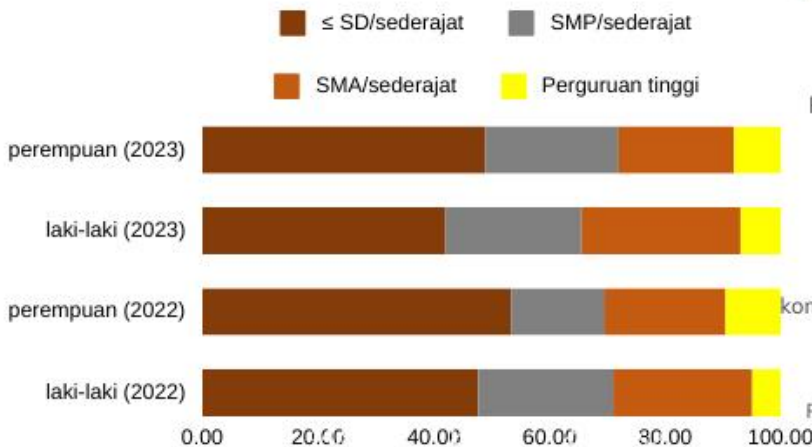
Distribusi Pembagian Pengeluaran Per Kapita



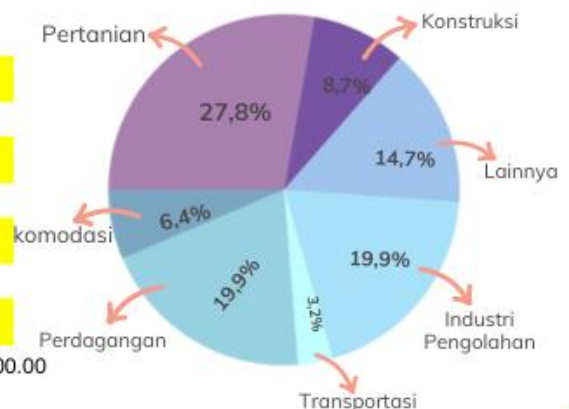
KETENAGAKERJAAN CILACAP 2023



Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (%)



Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (%)



PROFIL PENDIDIKAN CILACAP 2023

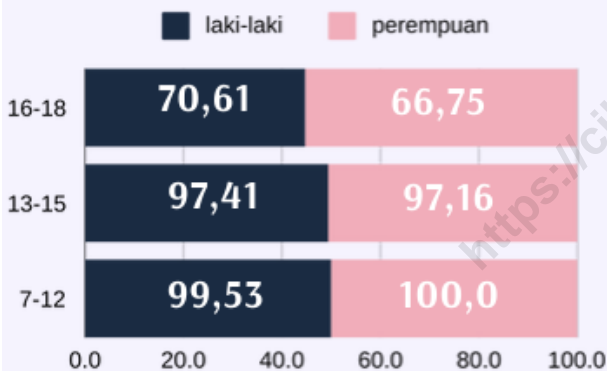
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Penduduk Usia >25
Tahun

7,39

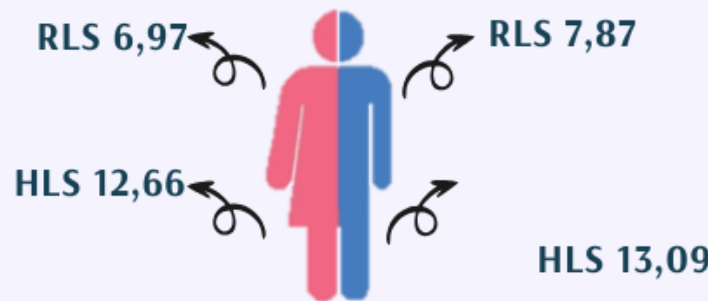
Harapan Lama Sekolah (HLS)
Anak Sekolah (HLS) Anak
Usia >7 Tahun

12,67

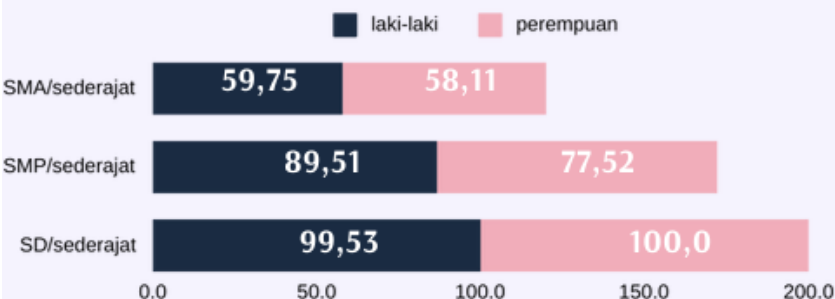
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin



RLS dan HLS Menurut Jenis Kelamin



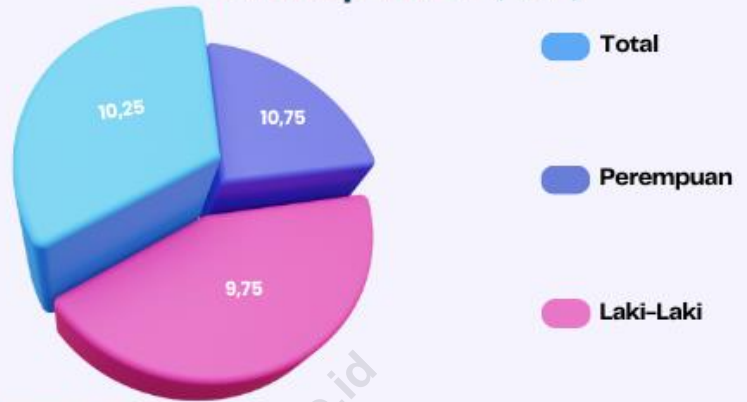
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin



KESEHATAN

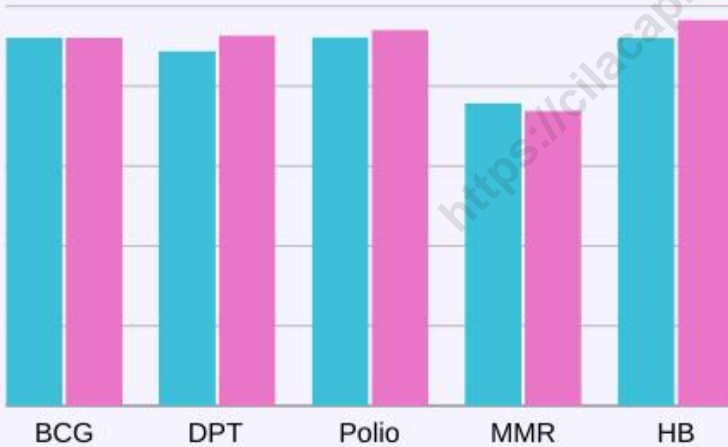


Angka Kesakitan Kabupaten Cilacap 2024 (%)

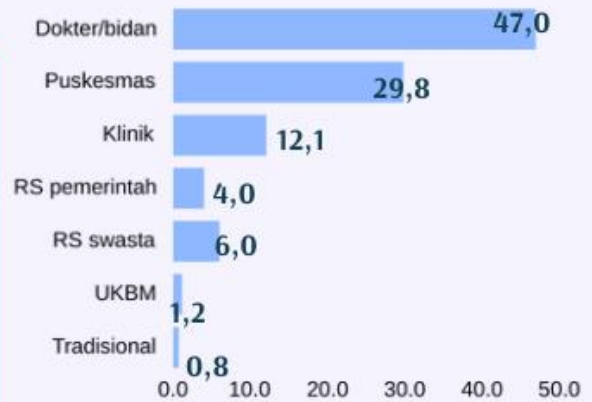


Cakupan Imunisasi di Kabupaten Cilacap (%)

2023 2024

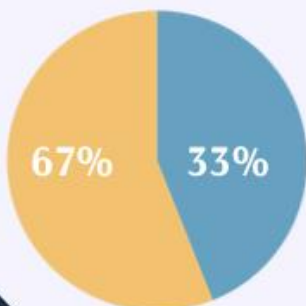


Fasilitas Berobat Jalan 2023



Penduduk Yang Berobat Jalan (%) 2023

berobat jalan tidak



KEPENDUDUKAN CILACAP

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Lima puluh enam persen penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa, termasuk provinsi Jawa Tengah. Penyumbang jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes kemudian disusul Kabupaten Cilacap di urutan kedua. Tingginya jumlah penduduk merupakan tantangan besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.



Sumber gambar: vektorstock.com

Beberapa teori dan penelitian terkini muncul untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk. Salah satu yang populer adalah teori *Neo-Malthusian*. Teori tersebut menyebutkan bahwa untuk mengendalikan jumlah penduduk maka angka kelahiran juga harus dikendalikan. Caranya dengan *preventive checks* atau penggunaan alat kontrasepsi.

Penggunaan kontrasepsi sudah dijadikan salah satu program nasional Indonesia yaitu dengan pencanangan program Keluarga Berencana (KB). KB merupakan solusi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga terwujud penduduk yang sejahtera. Kesejahteraan menjadi salah satu tujuan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dengan visi “Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera”. Penjabaran dari visi tersebut adalah disusunnya kebijakan perencanaan pembangunan untuk memantapkan pencapaian prioritas pembangunan yang terdiri dari sembilan aspek utama.

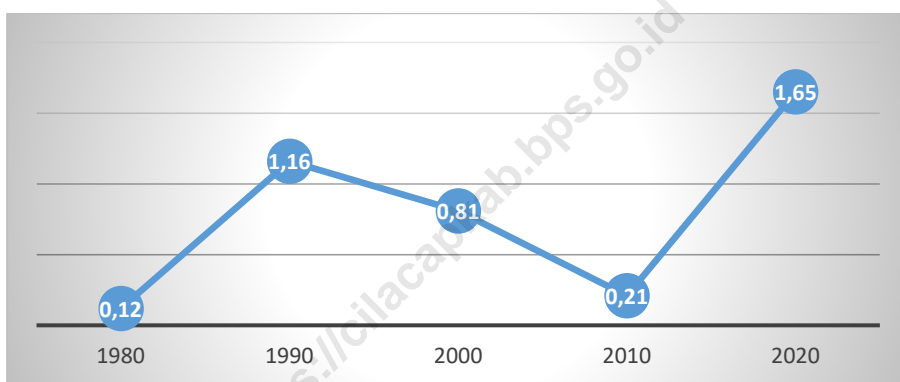
JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN

Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap pada pertengahan tahun 2024 berdasarkan hasil proyeksi penduduk LF SP2020 tercatat sebanyak 2.027.379 jiwa. Cilacap menduduki peringkat kedua sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah, setelah Kabupaten Brebes. Laju pertumbuhan penduduk bernilai positif dan stabil pada kisaran 1 persen semenjak periode 1980 sampai dengan 2010. Namun, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 dimana laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,65 persen. Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai Jawa

Tengah yaitu sebesar 1,17 persen dan merupakan urutan pertama dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.

Laju pertumbuhan penduduk periode 2020-2025 untuk Kabupaten Cilacap berada pada angka 1,009 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Cilacap memiliki tren yang terus meningkat. Kewaspadaan pemerintah daerah terhadap lonjakan jumlah penduduk juga perlu ditingkatkan. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan permasalahan yang kompleks dalam masyarakat, seperti: pengangguran, kemiskinan, kerawanan pangan, keamanan, dan lain-lain.

Gambar 1.1 Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap, 1980-2020

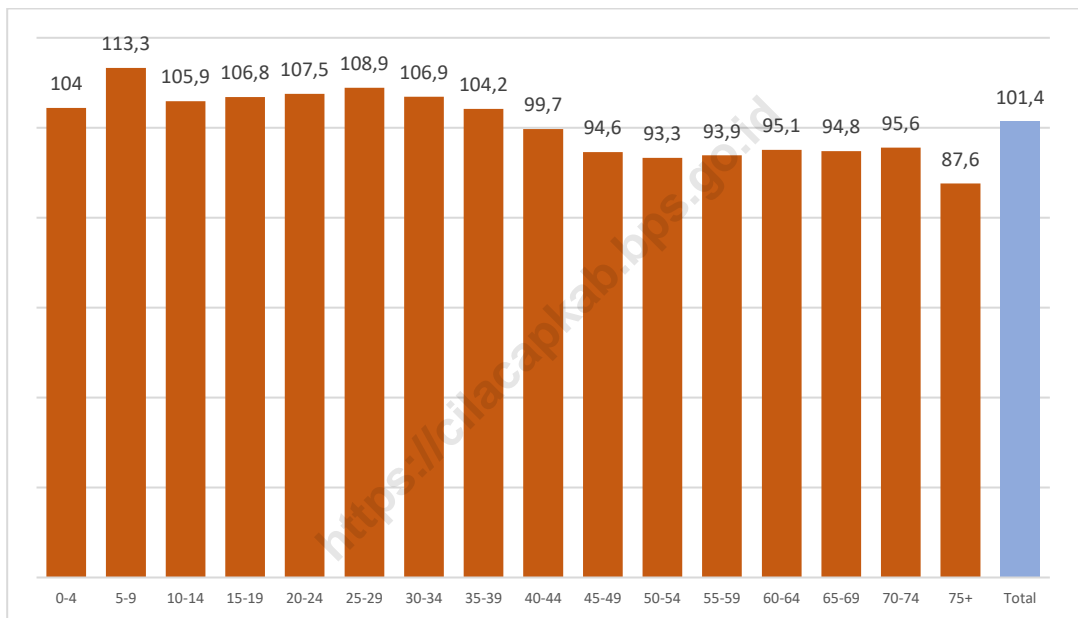


Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

Dilihat berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 sebesar 101. Artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Cilacap lebih sedikit daripada laki-laki. Rasio jenis kelamin Kabupaten Cilacap sama besar bila dibandingkan dengan rasio jenis kelamin Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 101. Kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah rata-rata memiliki pola yang sama dengan Kabupaten Cilacap (jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan) terkecuali 12 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin kurang dari 100 yaitu: Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Pati, Kudus, Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang.

Jika dibagi berdasarkan kelompok umur, rasio jenis kelamin di Kabupaten Cilacap memiliki perbedaan pola. Pada kelompok umur 0-39 tahun jumlah penduduk laki-laki lebih banyak, sedangkan untuk kelompok umur di atasnya (lebih dari 40 tahun) penduduk didominasi oleh perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Cilacap harapan hidup perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

Gambar 1.2 Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur di Kabupaten Cilacap pertengahan tahun 2024



Sumber: Proyeksi Penduduk LF SP2020

PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan yang terus menerus terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Pulau Jawa. Luas wilayah Pulau Jawa hanya 7 persen dari wilayah Indonesia, tetapi jumlah penduduknya mencapai lebih dari 50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Distribusi penduduk yang tidak merata ini mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi pula. Pada tahun 2023, Cilacap adalah kabupaten dengan kepadatan penduduk terkecil (872 jiwa/km²) dibandingkan dengan wilayah eks Karesidenan Banyumas. Kepadatan penduduk

kabupaten lain yaitu: Banyumas (1.328 jiwa/km²) , Purbalingga (1.288 jiwa/km²), Banjarnegara (924 jiwa/km²).

Melihat angka kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Cilacap tahun 2023 terlihat Kecamatan Cilacap Selatan merupakan kecamatan dengan angka kepadatan penduduk terbesar yaitu 10.554 jiwa/km². Sedangkan angka kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Kampunglaut yaitu sebesar 1120 jiwa/km².

Gambar 1.3 Kepadatan penduduk kabupaten Cilacap (jiwa/km²), 2019-2023

2019 (915 jiwa/km²)



2020 (924 jiwa/km²)



2021 (930 jiwa/km²)



2022 (893 jiwa/km²)



2023 (872 jiwa/km²)



Sumber: Cilacap Dalam Angka 2024

ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka beban ketergantungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah salah satu indikator kependudukan yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang tidak produktif.

Selama periode tahun 2020-2024 angka ketergantungan setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 angka beban tanggungan Kabupaten Cilacap sebesar 45,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 45 orang penduduk usia tidak produktif.

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2020-2024

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	433.594	1.356.088	156.511	43,52
2021	435.928	1.367.540	163.749	43,85
2022	437.943	1.378.710	171.110	44,18
2023	439.712	1.389.409	178.708	44,51
2024	447.218	1.399.369	186.690	45,30

Sumber: Proyeksi Penduduk LF SP2020

Jika dibandingkan dengan dekade sebelumnya, beban ketergantungan penduduk seharusnya mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terjadi fenomena bonus demografi yang bisa menjadi peluang untuk memajukan kesejahteraan penduduk Indonesia dengan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ada sebanyak 22,2 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) hingga tahun 2024 terus turun menjadi 21,9 persen. Struktur umur penduduk kabupaten Cilacap masih didominasi oleh penduduk usia produktif mencapai 70 persen pada tahun 2020 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 69 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia

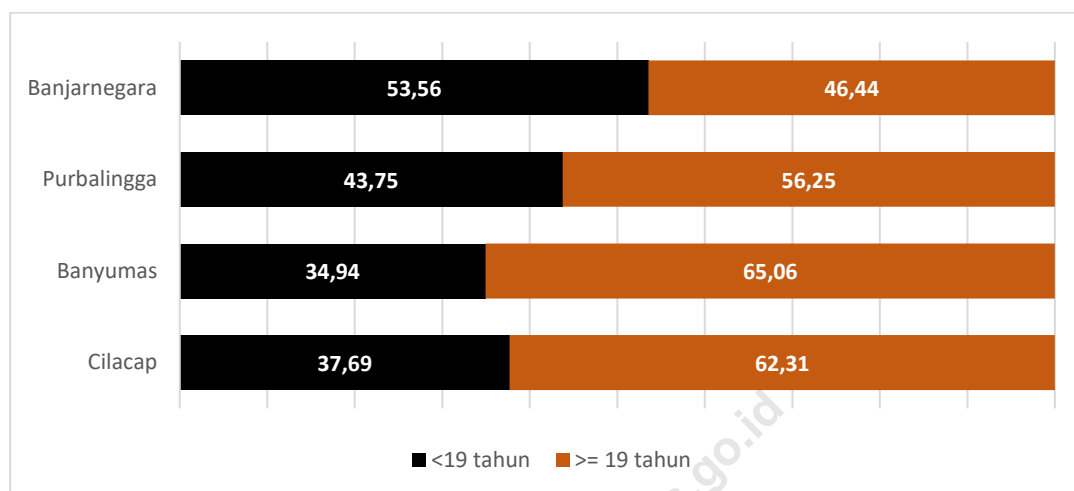
produktif di Kabupaten Cilacap sangat potensial sebagai pasar tenaga kerja. Sementara itu proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) semakin meningkat dimana dari 8 persen pada tahun 2020 menjadi 9 persen tahun 2024.

WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA

Definisi usia perkawinan pertama adalah umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali. Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal usia perkawinan baik untuk perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Penduduk yang menikah sebelum batasan usia tersebut harus melewati sidang hukum pada Pengadilan Agama di masing-masing wilayah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan anak usia minimal untuk menikah bagi wanita yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional usia perkawinan pertama idealnya usia 21 hingga 25 tahun.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama sebelum usia 19 tahun di Cilacap adalah 40,91 persen. Dibandingkan dengan kabupaten tetangga (Banyumas), perempuan-perempuan di Kabupaten Cilacap memutuskan untuk kawin pada usia yang relatif muda. Hal tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Padahal kawin pada usia muda dapat memberikan dampak buruk bagi perempuan, misalnya: perceraian, keguguran, ketidaksiapan finansial, konflik dalam keluarga, dan sebagainya. Salah satu faktanya adalah banyaknya kehamilan yang dialami oleh wanita usia muda di Cilacap. Data menunjukkan bahwa lebih dari 20 persen wanita usia kurang dari 19 tahun yang pernah hamil. Selain itu, tingkat perceraian di Kabupaten Cilacap juga tinggi dimana menduduki peringkat pertama se-Jawa Tengah. Pada tahun 2023 dari setiap 3 kejadian nikah terdapat 1 kejadian perceraian.

Gambar 1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama Tahun 2023



Sumber: Susenas

PENGUNAAN ALAT/CARA KB

Menurut Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi program KB, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Berdasarkan data BKKBN Provinsi Jawa Tengah, jumlah peserta KB aktif dalam kurun waktu tiga tahun semakin berkurang. Penggunaan KB baik untuk wanita maupun pria menurun drastis. Hal tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan jumlah kelahiran di Kabupaten Cilacap. Perlu diadakan sosialisasi yang masif tentang penggunaan KB supaya masyarakat Cilacap lebih peduli tentang jumlah anak yang akan dimiliki. Tingkat kelahiran yang tidak terkendali dapat menyebabkan permasalahan multidimensional.

Tabel 1.2 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi yang Digunakan di Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2023

Jenis Kontrasepsi	Peserta KB Aktif		
	2021	2022	2023
IUD (<i>intrauterine device</i>)	27.550	25.935	15.243
MOW (Metode Operasi Wanita)	6.077	5.537	3.217
MOP (Metode Operasi Pria)	463	247	284
Kondom	7.109	6.772	4.770
Implan	38.584	38.184	21.870
Suntikan	109.083	103.901	63.882
Pil	44.782	38.781	22.958
Jumlah Peserta KB Aktif	233.648	219.357	132.224
Jumlah Pasangan Usia Subur	348.057	334.360	254.771

Sumber : BKKBN Provinsi Jawa Tengah

Sebagian besar perempuan di Kabupaten Cilacap menggunakan kontrasepsi jenis suntik dan pil. Alat kontrasepsi tersebut relatif populer di masyarakat karena merupakan metode pencegah kehamilan yang paling awal muncul. Selain itu, harganya juga relatif terjangkau. Penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang juga mulai diminati oleh masyarakat. Diantaranya yaitu penggunaan metode IUD dan MOW yang memiliki tren meningkat selama tiga tahun terakhir. Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol akan menimbulkan berbagai masalah dan beban untuk pemerintah. Sehingga tanggung jawab pengendalian jumlah penduduk lewat pemakaian kontrasepsi tidak hanya dilakukan oleh wanita, tetapi juga laki-laki. Dari total seluruh pengguna KB aktif di Kabupaten Cilacap, baru sekitar 4 persen laki-laki yang ikut berpartisipasi.

KESEHATAN & GIZI CILACAP

Indikator pembangunan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu komponen indikator pembangunan adalah tingkat kesehatan. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Cilacap menuangkan program kesehatan dalam RPD 2023-2026 yaitu meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat.



Sumber gambar: freepik.com

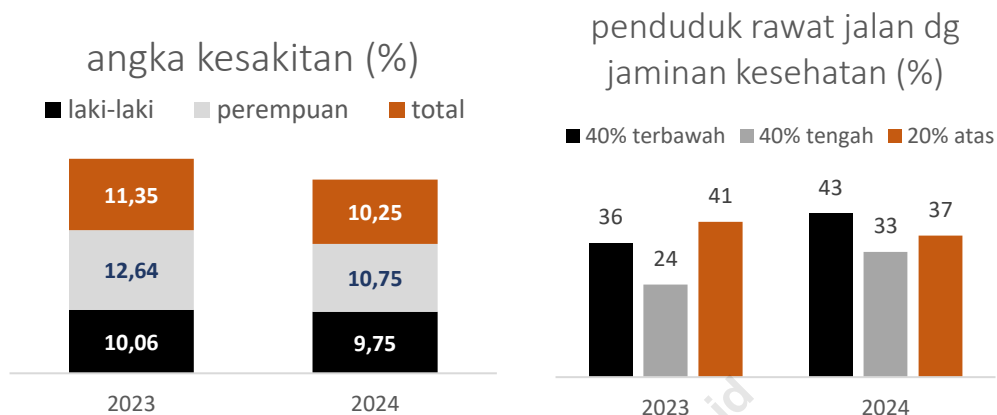
DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK

Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Derajat kesehatan dapat digambarkan oleh 4 faktor yaitu: faktor perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, menurunnya kasus penyakit menular, penanganan balita gizi buruk yang baik dan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Merujuk pada konsep yang diterapkan BPS dalam Susenas, morbiditas atau angka kesakitan menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Hasil Susenas tahun 2024 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Cilacap mencapai 10,25 persen, mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya (11,35 persen) yang menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin membaik.

Seiring dengan menurunnya angka kesakitan, penggunaan jaminan Kesehatan juga semakin merata. Tidak hanya penduduk kaya yang bisa berobat dengan jaminan Kesehatan, tetapi masyarakat lapisan bawah juga mulai tersentuh layanan tersebut. Pada tahun 2024, kelompok masyarakat dengan ekonomi 40% terbawah sudah berobat dengan jaminan Kesehatan lebih dari 43 persennya. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 35 persen.

Gambar 2.1 Angka kesakitan dan persentase penduduk rawat jalan dengan jaminan kesehatan di kabupaten Cilacap tahun 2023-2024



Sumber: Susenas

TINGKAT IMUNITAS DAN GIZI BALITA

Gizi yang baik adalah salah satu unsur penting untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Pemenuhan gizi anak harus diperhatikan sedini mungkin yaitu sejak masih dalam kandungan melalui makanan ibu hamil. Selain itu pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan karena ASI merupakan makanan pertama dan terbaik bagi bayi. ASI mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bayi yang mendapatkan ASI akan memiliki kekebalan tubuh yang kuat karena ASI mengandung zat antibodi pembentuk kekebalan tubuh yang bisa membantu melawan bakteri dan virus. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lainnya.

Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Pedoman pemberian makanan tambahan saat ini dikampanyekan oleh pemerintah dengan Pedoman Gizi Seimbang menggantikan slogan Makanan 4 Sehat 5 Sempurna. Istilah Makanan 4 Sehat 5 Sempurna tersebut mulai dikenalkan tahun 1952. Namun slogan tersebut dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan dan pemenuhan gizi manusia saat ini. Pedoman Gizi Seimbang mengacu pada *Nutrition Guide for Balanced Diet*, yaitu hasil kesepakatan konferensi pangan sedunia pada tahun 1992. Pedoman Gizi Seimbang memiliki 4 pilar prinsip yaitu : konsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih,

melakukan aktivitas fisik, serta mempertahankan dan memantau berat badan dalam batas normal.

Tabel 2.1 *Persentase Anak Kurang dari Dua Tahun yang Pernah diberi ASI dan Lamanya Disusui di Kabupaten Cilacap Tahun 2024*

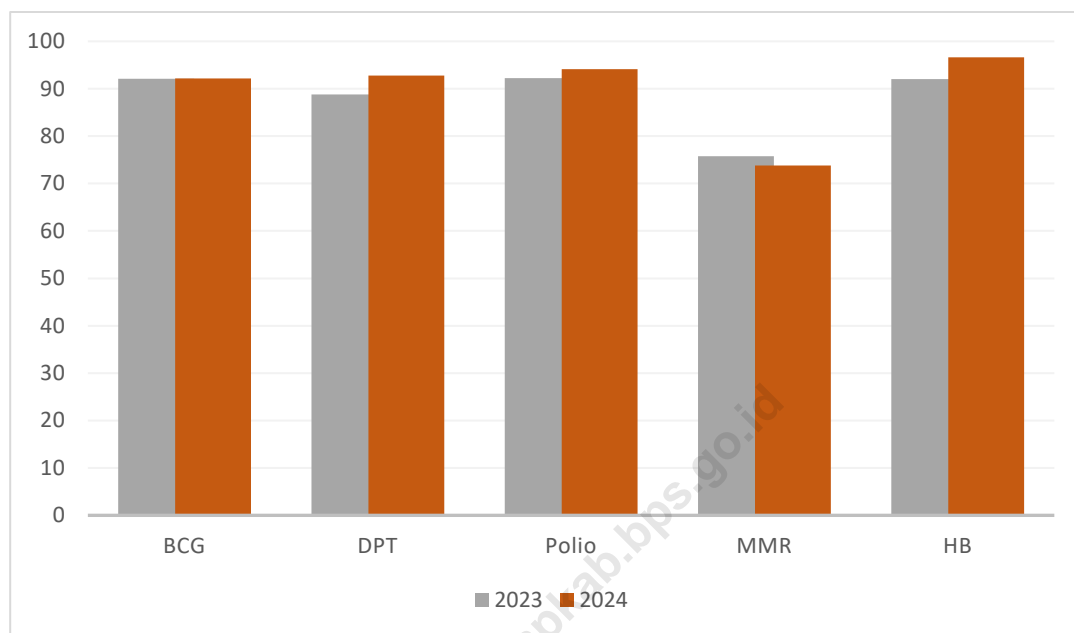
Jenis Kelamin	Persentase (%)	Rata-rata lama pemberian ASI (bulan)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	100,00	10,5
Perempuan	100,00	11,2
Total	100,00	10,9

Sumber: Susenas

Hasil Susenas 2024 menunjukkan bahwa anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah disusui di Kabupaten Cilacap sebanyak 100 persen baik itu bayi laki-laki maupun perempuan. Rata-rata lama pemberian ASI untuk bayi di Kabupaten Cilacap adalah 11 bulan. Pemberian ASI sangat penting untuk tumbuh kembang bayi. Apalagi pemberian ASI eksklusif sampai dengan bayi berusia 6 bulan.

Kesuksesan seorang ibu dalam memberikan ASI eksklusif harus didukung oleh semua pihak. Banyak faktor yang menyebabkan ibu tidak memberikan ASI diantaranya yaitu : ibu memiliki pekerjaan diluar rumah yang mengharuskan anak ditinggal pada suami atau pengasuh, kurangnya pengetahuan ibu akan manfaat ASI. Selain itu kendala ibu dalam menyusui ada dua faktor, pertama faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang manajemen laktasi, kedua faktor eksternal yaitu kurangnya ASI atau ASI belum keluar pada hari-hari pertama sehingga perlu tambahan susu formula, kurang mengertinya ibu tentang kolostrum dan masih ada anggapan bahwa ASI ibu kurang gizi dan kualitasnya tidak baik. Padahal pemberian ASI eksklusif sangat bermanfaat untuk bayi.

Gambar 2.2 Persentase penduduk berumur 0-59 bulan menurut cakupan imunisasi di Kabupaten Cilacap, 2023-2024



Sumber: Susenas

Selain ASI, imunisasi juga sangat diperlukan dalam masa pertumbuhan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, imunisasi merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu prioritas Kementerian Kesehatan untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* khususnya dengan menurunkan angka kematian anak. Ada dua jenis imunisasi yaitu imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi yang wajib diberikan pada balita menurut pemerintah terdiri atas BCG (*Bacillus Calmette Guerin*), DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus), Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B. Sedangkan imunisasi pilihan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing antara lain vaksin MMR (*Measles, Mums, Rubella*), Hib, Tifoid, Varisela, Hepatitis A, Influenza, Pneumokokus, Rotavirus, Japanese Encephalitis, dan HPV (*Human Papilloma Virus*). Seorang anak bisa dinyatakan memperoleh imunisasi lengkap apabila telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi polio, satu kali imunisasi campak dan tiga kali imunisasi hepatitis B.

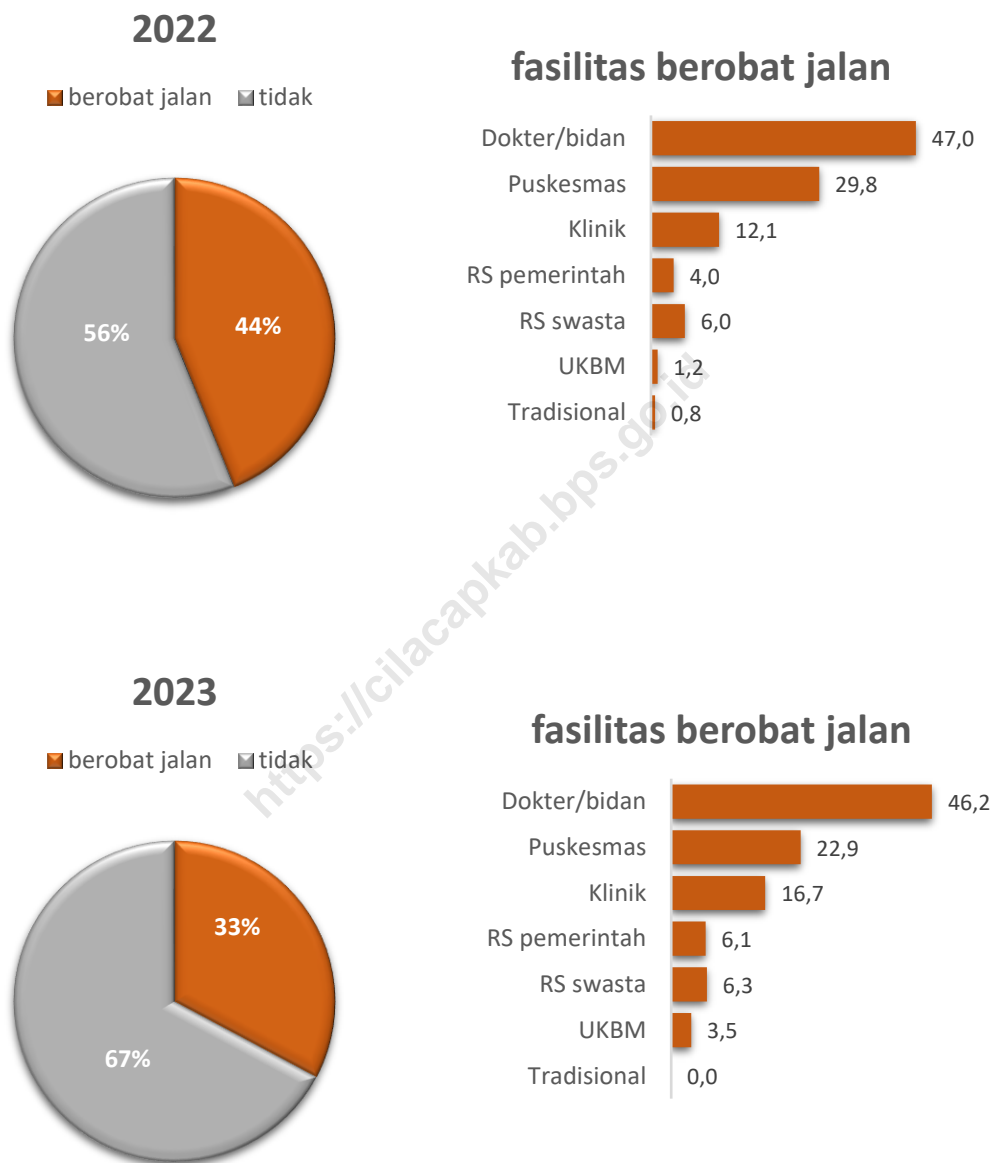
Pada tahun 2024 cakupan imunisasi BCG di Kabupaten Cilacap mencapai lebih dari 90 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa bayi-bayi yang baru lahir telah diberikan

tameng awal untuk memulai kehidupannya dengan intervensi medis. Diharapkan kematian bayi dapat ditekan dengan meningkatnya capaian imunisasi BCG. Akan tetapi, capaian imunisasi lanjutan untuk balita perlu ditingkatkan lagi karena jumlah balita yang memperoleh imunisasi lengkap hanya berkisar pada angka 60 persen lebih rendah dari rata-rata provinsi Jawa Tengah. Diharapkan seorang balita dapat terpenuhi kebutuhan imunisasi wajib dan imunisasi pilihan sehingga derajat kesehatan mereka akan meningkat. Dengan kesehatan yang prima anak-anak akan tumbuh menjadi generasi cerdas dan berbakat.

PEMANFAATAN FASILITAS KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016 tertuang bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah kesehatan tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga mengikutsertakan peran dari daerah dan masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari persentase penduduk yang berobat jalan di Kabupaten Cilacap paling banyak adalah praktek dokter/bidan yaitu sebesar 49,6 persen di tahun 2019 dan 46,6 persen pada tahun berikutnya. Dipilihnya fasilitas kesehatan ini karena faktor akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan keberadaannya yang tersebar di seluruh wilayah. Selain itu prosedur pelayanannya relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan rumah sakit. Jumlah penduduk yang menjalani pengobatan rawat jalan meningkat di tahun 2020. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan meningkat dengan baik.

Gambar 2.3 Persentase penduduk yang sakit dan berobat jalan menurut fasilitas berobat jalan di Kabupaten Cilacap, 2022-2023



Sumber: Susenas

Dari hasil Susenas 2023, pengobatan tradisional sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Cilacap. Masyarakat sudah lebih familiar dengan pengobatan medis yang ada di Kabupaten Cilacap. Terlebih setelah adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang juga melayani kalangan masyarakat miskin untuk dapat berobat gratis. Peran penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan premi yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Namun, kendati demikian kesadaran untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit secara preventif yang utama agar terwujud masyarakat yang sehat dan sejahtera.

<https://cilacapkab.bps.go.id>

PENDIDIKAN CILACAP

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan kalimat yang sering kita dengar saat pembacaan pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945. Satu satunya cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan pendidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan merupakan hak segala bangsa, sebagaimana dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam hal ini pemerintah wajib membiayai pendidikan formal atau melalui sekolah



Sumber gambar: all-freownload.com

Sekolah merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 18 tentang pendidikan nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal yang terdiri atas, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan adalah kunci bagi setiap warga negara untuk mendapat hak dan kewajiban dalam memperoleh ilmu.

Tabel 3.1 Rata-rata lama sekolah (tahun) dan harapan lama sekolah (tahun) di Kabupaten Cilacap, 2021-2023

Indikator pendidikan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata lama sekolah	7,09	7,18	7,39
Laki-laki	7,47	7,66	7,87
Perempuan	6,76	6,77	6,97
Harapan lama sekolah	12,63	12,66	12,67
Laki-laki	13,07	13,08	13,09
Perempuan	12,58	12,65	12,66

Sumber: IPM

Secara umum di kabupaten Cilacap, rata – rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 sebesar 7,39 tahun. Secara umum penduduk Kabupaten

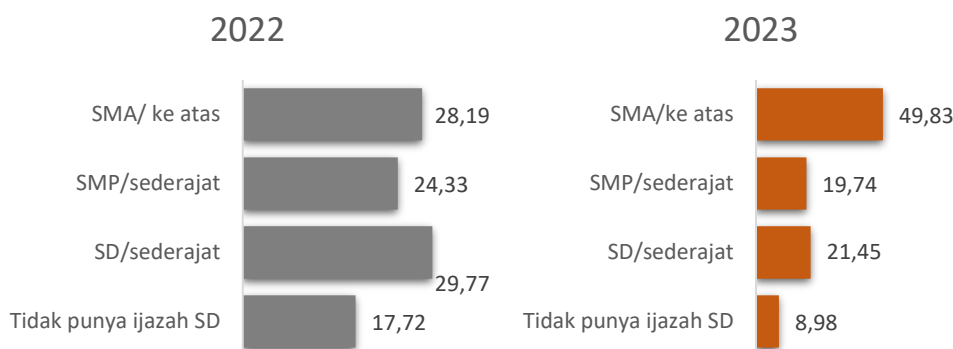
Cilacap baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 1 SMP. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka rata-rata lama sekolah semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya rata-rata lama sekolah tidak lepas dari upaya pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan untuk mendorong kualitas pendidikan makin baik. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa rata rata pendidikan laki- laki dan perempuan terpaut 1 tahun.

Indikator pendidikan lainnya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator ini mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah atau usia 7 tahun keatas. HLS Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 sebesar 12,67 tahun. Artinya anak usia 7 tahun keatas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 13 tahun atau sampai lulus SLTA. Sama seperti rata – rata lama sekolah, angka HLS ini setiap tahunnya semakin meningkat. HLS laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang mengindikasikan peluang laki-laki untuk memperoleh pendidikan yang layak lebih besar ketimbang perempuan.

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Selain indikator rata-rata lama sekolah dan HLS, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan.

Gambar 3.1 *Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Cilacap, 2022-2023*

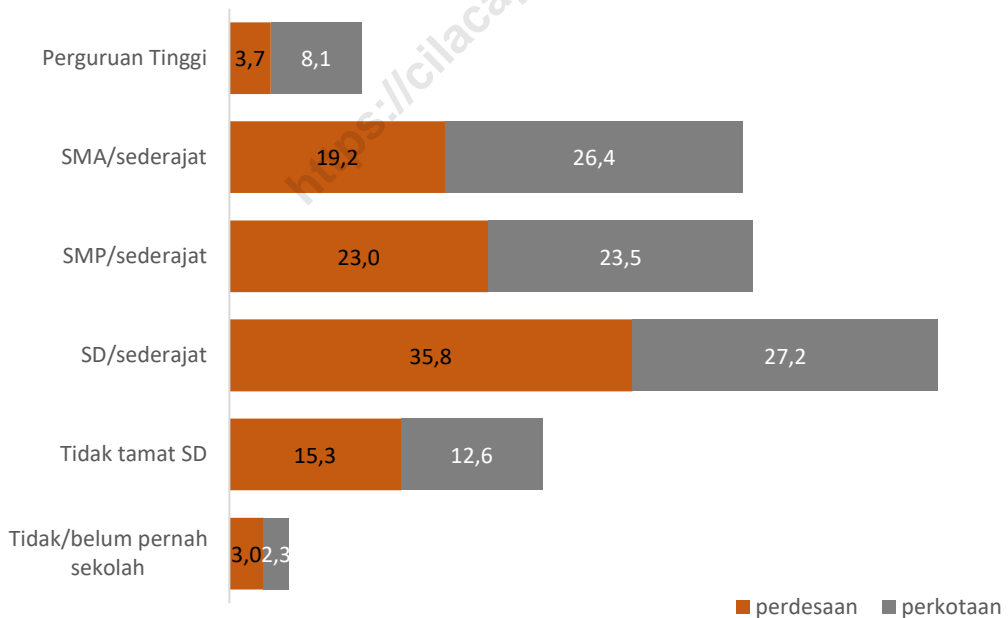


Sumber: Susenas

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi juga kesejahteraannya. Gambar 3.1 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Besaran penduduk yang tamat SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ ke atas pada tahun 2023 berturut-turut adalah sebesar 21 persen; 20 persen, dan 50 persen.

Pendidikan yang ditamatkan untuk penduduk perdesaan dan perkotaan juga memiliki perbedaan. Masyarakat di perkotaan lebih peduli terhadap pendidikan sehingga jenjang pendidikan perguruan tinggi menjadi prioritas bagi mereka. Sebanyak 6,5 persen masyarakat di wilayah perkotaan Cilacap merupakan lulusan perguruan tinggi. Sebaliknya, masyarakat perdesaan banyak yang mencukupkan diri dengan pendidikan dasar saja yaitu SD sampai SMP dimana lulusan SD sebesar 34 persen dan lulusan SMP 24 persen.

Gambar 3.2 Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut klasifikasi wilayah dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Cilacap tahun 2023



Sumber: Susenas

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut usia sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022-2023

Kelompok umur	2022			2023		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	100,00	99,95	99,98	99,53	100,00	99,76
13-15	97,68	100,00	98,55	97,41	97,16	97,29
16-18	61,32	75,72	67,66	70,61	66,75	68,90

Sumber: Susenas

Berdasarkan data Susenas, terjadi penurunan APS secara umum dari tahun 2021 ke 2022. APS untuk kelompok usia 7-12 tahun nilainya hampir mencapai 100 persen baik laki – laki maupun perempuan. APS perempuan pada seluruh kelompok umur lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan sudah dilakukan. Perempuan dapat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi setara dengan laki-laki.

Sama halnya dengan APS, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi persentase APM maka semakin banyak pula penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan umur pada jenjang pendidikan tertentu. Secara rata – rata APM Kabupaten Cilacap mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023 pada seluruh jenjang. Penurunan terbesar terjadi pada jenjang SMA/ sederajat. APM perempuan masih perlu didongkrak agar sejajar dengan laki-laki supaya peningkatan kualitas hidup juga semakin merata.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut usia sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022-2023

Tingkatan pendidikan	2022			2023		
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/ sederajat	100,00	99,95	99,98	99,53	100,00	99,76
SMP/ sederajat	86,73	84,18	85,44	89,51	77,52	83,69
SMA/ sederajat	57,97	67,24	62,05	59,75	58,11	59,02

Sumber: Susenas

KETENAGAKERJAAN CILACAP

Ketenagakerjaan menurut Undang Undang nomor 13 tahun 2013 bukan hanya sebatas kegiatan pada masa kerja saja. Menurut peraturan tersebut ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Syarat penting yang harus dimiliki warga asing yang bekerja di Indonesia adalah memiliki visa kerja.



Sumber gambar: VectorStock.com

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa tenaga kerja maka tidak mungkin program pembangunan dapat dilaksanakan. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang semakin lengkap dan tepat akan memudahkan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan mengingat jumlah dan komposisi tenaga kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja mencakup sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Secara alamiah pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun demikian pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang baru berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan tersebut akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai keadaan angkatan kerja di Kabupaten Cilacap. Beberapa indikator yang dianalisa mencakup Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penduduk bekerja dan pekerja anak, Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

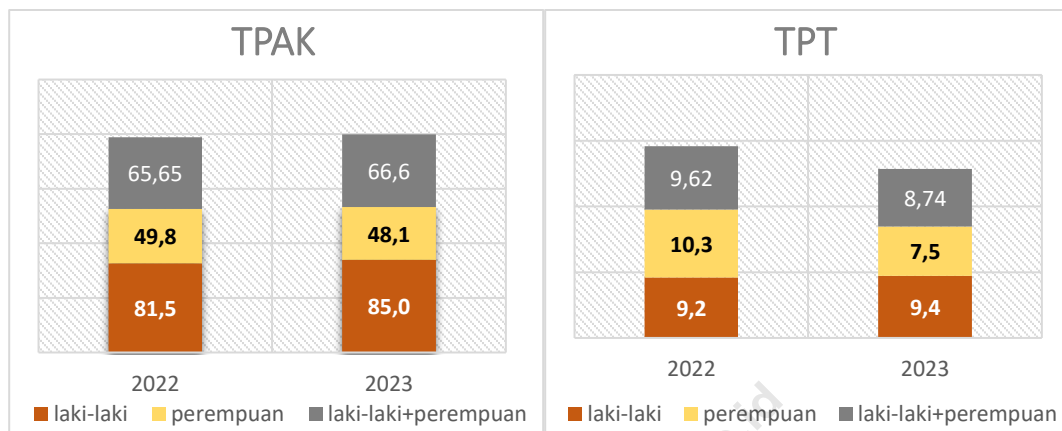
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi, Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan. Termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja,

Dari gambar 4.1 terjadi peningkatan TPAK yang signifikan baik untuk laki-laki. Hal ini terjadi sebagai salah satu dampak membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi covid-19. Kesempatan kerja bertambah seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengangguran di Kabupaten Cilacap juga ikut turun. Pada tahun 2023 tercatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) Cilacap sebesar 8,74 persen turun sekitar 0,8 poin dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran Perempuan turun signifikan mencapai 3 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 4.1 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2022-2023

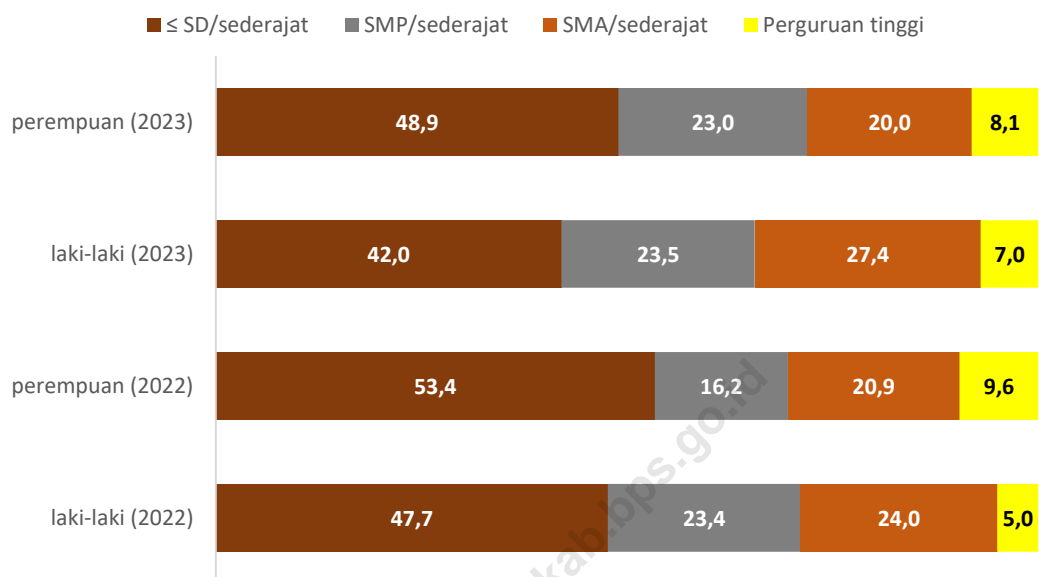


Sumber: Sakernas

Pendidikan yang tinggi merupakan jembatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan pendapatan besar. Hampir semua orang berkeinginan bekerja dengan penghasilan yang tinggi. Untuk itu mereka berupaya dengan memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap yang bekerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu tamatan SD dan SMP. Hal tersebut terjadi baik pada pekerja laki-laki maupun perempuan. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, para pekerja tidak memiliki kesempatan untuk memilih pekerjaan dengan upah yang layak. Mereka cenderung bekerja serabutan dengan upah minim. Pekerja dengan tingkat keahlian yang tinggi membutuhkan latar belakang pendidikan yang tinggi pula. Persentase pekerja dengan latar belakang pendidikan universitas persentasenya hanya 8 persen untuk perempuan. Bahkan nilai untuk laki-laki hanya berkisar 7 persen di tahun 2023. Lebih banyak pekerja laki-laki yang berpendidikan rendah sehingga pekerjaan yang dimiliki pun menghasilkan pendapatan yang minim.

Gambar 4.2 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022-2023

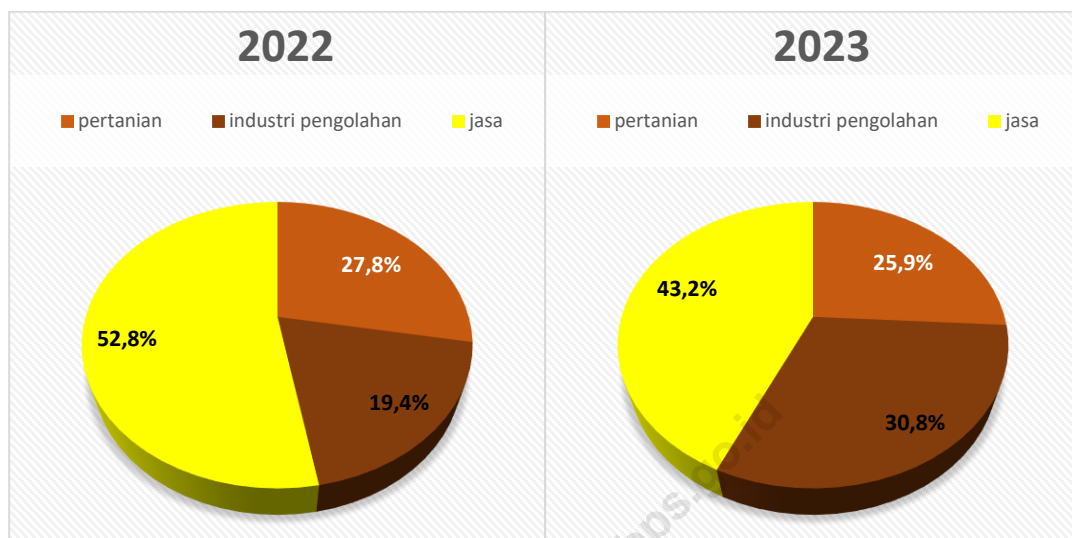


Sumber: Sakernas

LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS PEKERJAAN

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam melihat penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan menjadi 7 sektor lapangan usaha yaitu: pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi, dan lainnya. Kategori lainnya meliputi: pertambangan dan penggalian, listrik dan gas, penyediaan air, informasi komunikasi, keuangan, *real estate*, jasa perusahaan, pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa-jasa lainnya.

Gambar 4.3 Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Cilacap, 2022 dan 2023



Sumber: Sakernas

Mayoritas penduduk Kabupaten Cilacap bekerja di sektor pertanian. Produksi pertanian di Cilacap menduduki peringkat pertama di Provinsi Jawa Tengah, khususnya produksi padi dan palawija. Banyak sekali masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut. Industri pengolahan menjadi pilihan kedua bagi masyarakat dalam mencari mata pencaharian. Banyak perusahaan industri yang berdiri di wilayah Cilacap sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal. Perusahaan tersebut diantaranya: Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap, semen Solusi Bangun Indonesia, pengalengan tuna Juifa, pengawetan udang Toxindo, dan masih banyak lainnya.

PEKERJA MENURUT USIA

Secara umum pekerja di Kabupaten Cilacap terkonsentrasi pada kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 25 sampai dengan 54 tahun. Penduduk pada kelompok usia tersebut merupakan tulang punggung keluarga sehingga memang harus aktif bekerja untuk memperoleh pendapatan. Kelompok penduduk lanjut usia juga masih ikut mendominasi sebaran pekerja di Cilacap. Sebanyak 26 persen penduduk berusia lebih dari 55 tahun masih aktif bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Penduduk usia muda usia 15 sampai dengan 24 tahun yang bekerja sebanyak 11 persen. Terdapat pekerja usia muda baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Pekerja yang berada pada kelompok muda tersebut merupakan pekerja baru yang minim pengalaman. Sebagian besar dari mereka adalah *fresh graduate* yang seharusnya memiliki ketrampilan lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

Tabel 4.1 Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Cilacap, 2022-2023

Golongan Umur	2022			2023		
	Laki-laki (L)	Perempu an (P)	L+P	Laki-laki (L)	Perempu an (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
15– 24	11,65	14,49	12,73	9,50	12,95	10,75
25 – 54	62,17	58,53	60,79	66,15	60,54	64,11
55 +	26,18	26,98	26,48	24,35	26,51	25,14
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sakernas

TARAF & POLA KONSUMSI CILACAP



Sumber gambar: all-free-download.com

Konsumsi adalah salah satu aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tingkat konsumsi yang tinggi akan mendorong kegiatan ekonomi yang lain yaitu produksi. Semakin tinggi tingkat produksi barang dan jasa maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga menunjukkan tingkat kesejahteraannya. Masyarakat dengan kesejahteraan yang tinggi cenderung mengeluarkan biaya untuk komoditas bukan makanan lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan rumah tangga akan menggeser pola konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula pengeluaran untuk komoditas bukan makanan. Hal ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang sifatnya terbatas sehingga kelebihan pendapatan akan digunakan oleh masyarakat untuk mengkonsumsi komoditas selain makanan, menabung, maupun investasi.

Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per kapita menurut jenisnya di Kabupaten Cilacap, 2021-2023

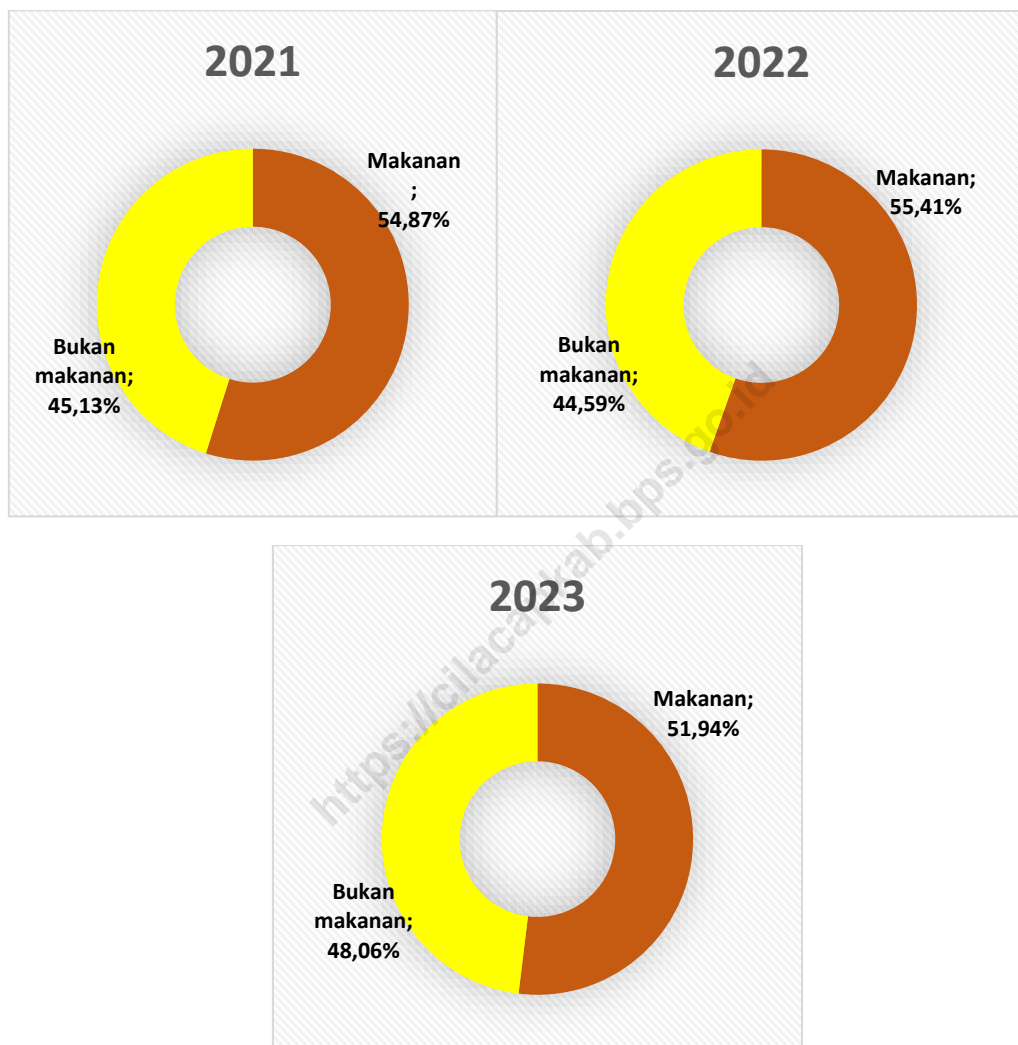
Jenis pengeluaran	Nominal (Rp)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	455.408	499.565	569.249
Bukan makanan	374.618	402.074	526.661
-Perumahan dan fasilitas rumah tangga	194.783	222.739	270.408
-Aneka barang dan jasa	92.147	95.126	129.568
-Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	19.499	19.232	24.127

Jenis pengeluaran	Nominal (Rp)		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
-Barang tahan lama	29.290	24.302	42.752
-Pajak. pungutan. dan asuransi	27.048	31.757	39.128
-Keperluan pesta dan upacara/kenduri	11.851	8.918	20.679
Total	830.026	901.639	1.095.911

Sumber: Susenas

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Cilacap meningkat dibandingkan tahun 2022 baik pengeluaran untuk makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran untuk makan mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok seperti: ikan, daging, telur, dan susu. Ketersediaan bahan pangan ikut menipis akibat krisis pangan global sehingga kenaikan harga juga dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan signifikan terjadi pada makanan jadi yang melonjak lebih dari 14 persen. Kenaikan pengeluaran per kapita masyarakat Cilacap untuk bukan makanan juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai berjalan stabil.

Gambar 5.1 Proporsi pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Cilacap. 2021-2023

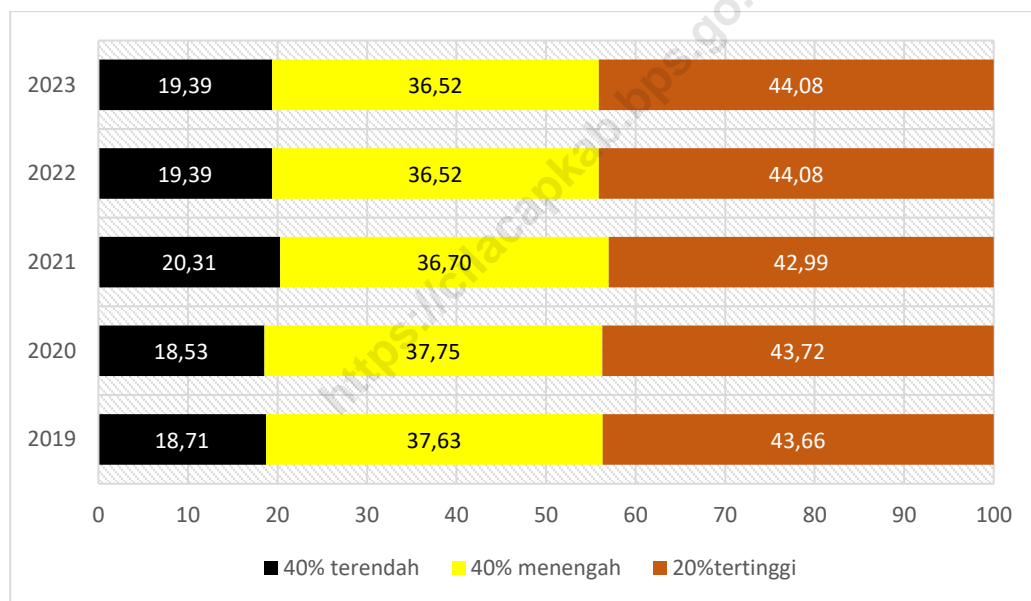


Sumber: Susenas

Proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya selalu mendominasi pengeluaran penduduk di Kabupaten Cilacap. Namun, sejak tahun 2021 pola pengeluaran masyarakat mulai berubah seperti yang terlihat pada gambar 5.1. Pengeluaran makanan secara umum kembali mendominasi pengeluaran total kebutuhan masyarakat. Komponen yang mengalami kenaikan signifikan diantaranya yaitu: padi-padian, minyak, dan makanan jadi.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Berdasarkan kriteria tersebut penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu: 40 persen kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40 persen kelompok penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen kelompok penduduk berpendapatan tinggi. Kelas yang menjadi fokus perhatian adalah kelompok penduduk pertama. Jika mereka memperoleh lebih dari 17 persen pendapatan di suatu wilayah maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah. Pada periode tahun 2019 sampai dengan 2023, 40 persen kelompok penduduk berpendapatan rendah memperoleh lebih dari 17 persen pendapatan secara menyeluruh sehingga dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Cilacap relatif rendah.

Gambar 5.2 Distribusi pembagian pengeluaran per kapita di kabupaten Cilacap. 2019-2023



Sumber: Susenas

Konsumsi Kalori dan Protein

Konsumsi kalori dan protein dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan perkalian kuantitas makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan

protein dalam setiap makanan tersebut. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia adalah konsumsi kalori sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 5.2 Konsumsi kalori dan protein per kapita per hari menurut daerah tempat tinggal di kabupaten Cilacap. 2021-2023

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2021	2.068	1.971	2.010
2022	1.956	1.971	1.965
2023	2.112	2.026	2.062
Protein (gram)			
2021	55,26	52,24	53,43
2022	54,37	52,60	53,33
2023	59,07	56,25	57,43

Sumber: Susenas

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, kecukupan gizi penduduk Cilacap baik kebutuhan kalori maupun protein belum memenuhi standar yang sudah ditentukan. Standar yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2013 dimana angka kecukupan energi sebesar 2150 kalori dan protein sebesar 57 gram. Konsumsi kalori penduduk perkotaan lebih kecil dibandingkan penduduk perdesaan. Mereka cenderung lebih banyak mengonsumsi protein karena ketersediaan pangan yang lebih beragam di perkotaan. Konsumsi masyarakat perdesaan lebih ke makanan pokok yang mudah dijangkau oleh mereka.

PERUMAHAN CILACAP

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Pemenuhan atas kebutuhan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga pemerintah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian pula dalam



Sumber gambar: freepik.com

Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU- PKP) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui peyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan manusia.

Pemenuhan kebutuhan rumah juga tertuang dalam kesepakatan internasional SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2030. Pada tujuan ke enam terfokus pada upaya ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Pada tujuan ke tujuh fokus pada energi bersih dan terjangkau, dengan akses yang terjangkau pula, andal, berkelanjutan, modern untuk semua. Tujuan ke sebelas fokus pada kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari dari permukiman. baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai rumah tinggal juga menunjukkan status sosial seseorang. Semakin baik status sosialnya maka maka semakin baik pula pemenuhan kebutuhan perumahannya.

Gambaran Perumahan di Indonesia

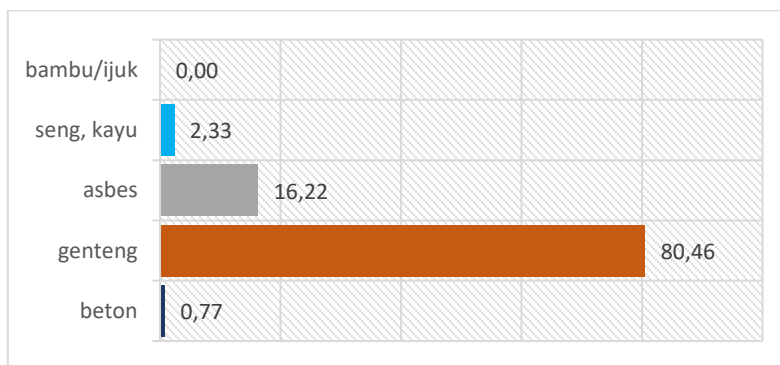
Pada umumnya pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia cukup baik. Lebih dari 93 persen rumah tangga menempati rumah milik sendiri. Akan tetapi,

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir persentasenya semakin menurun. Harga rumah dan tanah yang semakin melonjak menjadi penyebabnya. Menurut catatan perhimpunan pengusaha Real Estate Indonesia (REI), kenaikan harga rumah di kota besar mencapai 10-30 persen. Angka tersebut melebihi angka inflasi nasional yang berkisar 5 persen setiap tahunnya. Tingginya kenaikan harga rumah membuat masyarakat lebih memilih sewa atau kontrak untuk menghemat biaya. Ataupun kalau membeli rumah dengan kualitas yang seadanya sesuai dengan uang yang dimiliki. Padahal pemenuhan kebutuhan rumah yang layak harus melihat dari tiga aspek yaitu: kondisi bangunan, fasilitas perumahan, dan kesehatan lingkungannya.

Kondisi Fisik Bangunan

Kondisi fisik bangunan yang menjadi komponen utama rumah adalah jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, dan luas lantai. Atap merupakan bagian dari struktur bangunan tempat tinggal yang berfungsi sebagai penutup secara langsung dari gangguan hujan, sinar matahari, dan angin. Kriteria atap rumah yang layak adalah terbuat dari material beton/genteng/asbes/seng/bambu/kayu. Berdasarkan data Susenas, material atap yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap sudah layak dimana genteng tanah liat mendominasi jenis material atap. Pasokan genteng tanah liat dari wilayah tetangga (Kabupaten Kebumen) membuat jenis material ini selalu tersedia dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat Cilacap. Selain itu, pengaruh modernisasi terhadap struktur bangunan rumah di Cilacap juga mulai terasa. Sekitar 1 persen rumah tangga di Cilacap, baik daerah perkotaan maupun perdesaan, sudah menggunakan atap beton yang harga dan kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan genteng tanah liat.

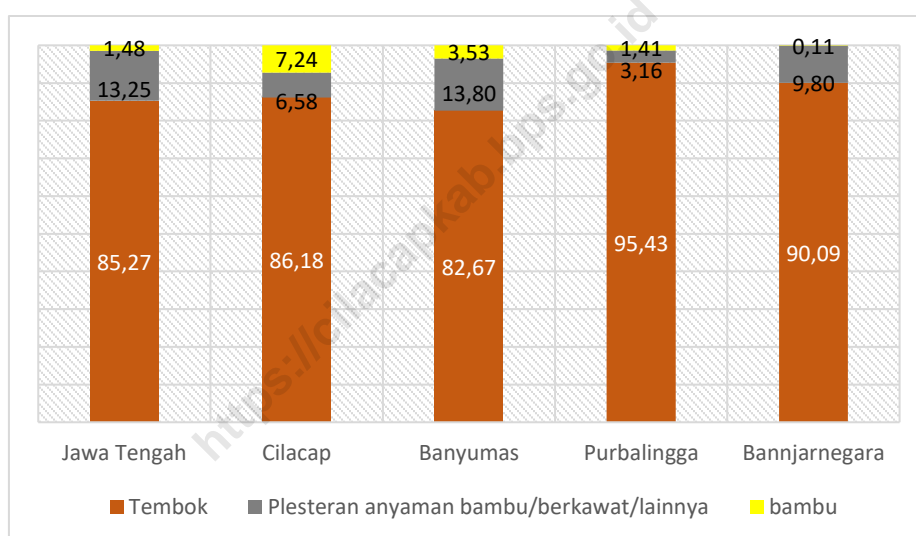
Gambar 6.1 Persentase jenis atap rumah di Kabupaten Cilacap, 2024



Sumber: Susenas

Komponen utama rumah berikutnya adalah jenis dinding. Dinding dikatakan memenuhi syarat kelayakan jika bersifat tidak lembab dan tidak mudah ditembus angin. Jenisnya yaitu dinding yang terbuat dari tembok atau kayu. Lebih dari 85 persen perumahan di Cilacap sudah memiliki dinding yang layak. Sebagian besar memakai jenis dinding tembok baik di perkotaan maupun perdesaan. Akan tetapi, tingkat kelayakan tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yaitu Purbalingga dan Banjarnegara .

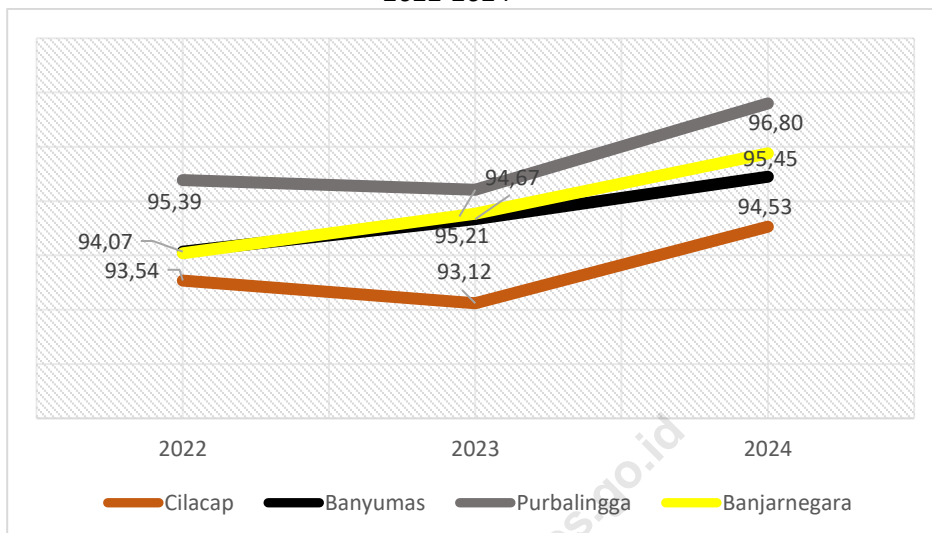
Gambar 6.2 Persentase rumah menurut jenis dinding di eks Karesidenan Banyumas tahun 2024



Sumber: Susenas

Indikator kelayakan dari sebuah rumah dilihat pula dari jenis lantai yang digunakan. Rumah dianggap layak huni jika lantainya terbuat dari material selain tanah, seperti: marmor/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, dan bambu. Persentase rumah dengan lantai layak di Kabupaten Cilacap terus meningkat selama tiga tahun terakhir, terutama di daerah perdesaan. Masyarakat perdesaan mulai mempunyai kemampuan ekonomi untuk membangun rumah dengan lantai yang layak. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kabupaten lain eks Karesidenan Banyumas, Kabupaten Cilacap memiliki persentase rumah berlantai layak yang paling kecil.

Gambar 6.3 Persentase rumah berlantai layak di eks Karesidenan Banyumas 2022-2024



Sumber: Susenas

Selain dari jenisnya, kelayakan lantai rumah juga dilihat dari luasannya. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang adalah minimal 10 meter persegi. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Untuk kondisi Kabupaten Cilacap lebih dari 90 persen perumahan sudah memenuhi standar kelayakan dari segi luas lantai, yaitu lebih dari 10 meter persegi per orangnya. Hal tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel 6.1 berikut. Namun, angka tersebut merupakan peringkat terbawah jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain eks Karesidenan Banyumas pada tahun 2024.

Tabel 6.1 Persentase rumah tangga menurut luas lantai per kapita di eks Karesidenan Banyumas tahun 2024

Luas lantai per kapita	Cilacap	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<= 7,2 m ²	3,20	1,39	3,00	-
7,2-9,9 m ²	6,28	5,89	3,88	4,65
>= 10 m ²	90,52	92,72	93,13	94,70

Sumber: Susenas

Fasilitas Perumahan

Sesuai dengan perkembangan zaman, rumah tidak lagi sekedar sebagai tempat berlindung tetapi juga mendukung kesehatan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Rumah yang layak huni akan meningkatkan derajat kesehatan penghuninya. Selain dari kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan juga mencerminkan tingkat kelayakan hunian. Fasilitas tersebut meliputi: sumber air minum, sumber penerangan dan tempat buang air besar yang digunakan.

Penyediaan air bersih merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Cilacap cukup memadai. Pada tahun 2024, terdapat 95,42 persen rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih dan 76,23 persen dengan akses air bersih yang layak. Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 meter. Akses air layak adalah jika sumber air minum utama yang digunakan rumah tangga adalah ledeng, air terlindungi dan air hujan. Air terlindungi mencakup: sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Selain air minum, fasilitas perumahan yang penting adalah sumber penerangan. Sumber penerangan ideal adalah yang berasal dari listrik (baik dari PLN/Perusahaan Listrik Negara maupun Non PLN). Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Semakin baik penerangan rumah maka semakin baik pula tingkat kehidupan penghuni-penghuni di dalamnya. Mereka dapat melakukan aktivitas baik di siang maupun malam hari. Lebih dari 99 persen rumah di wilayah Kabupaten Cilacap sudah memakai penerangan listrik, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Penggunaan jamban juga menjadi salah satu kriteria dalam penentuan fasilitas rumah yang baik. Jamban yang dimiliki sendiri oleh rumah tangga dengan pembuangan *septik tank* menjadi kriteria terbaik untuk fasilitas pembuangan air besar. Pada tahun 2024 di kabupaten Cilacap 93,28 persen perumahan menggunakan fasilitas jamban milik sendiri. Akan tetapi, penyediaan jamban yang layak harus lebih ditingkatkan terutama di daerah

perdesaan karena masih banyak penduduk yang menggunakan jamban bersama dengan tempat pembuangan akhir di kolam/sawah/sungai/danau/laut. Dengan meningkatkan kualitas pembuangan akhir diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi angka kesakitan

Tabel 6.2 *Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan di Kabupaten Cilacap tahun 2023-2024*

Fasilitas perumahan	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Penerangan listrik	100,00	99,44
Jamban sendiri	89,21	93,28

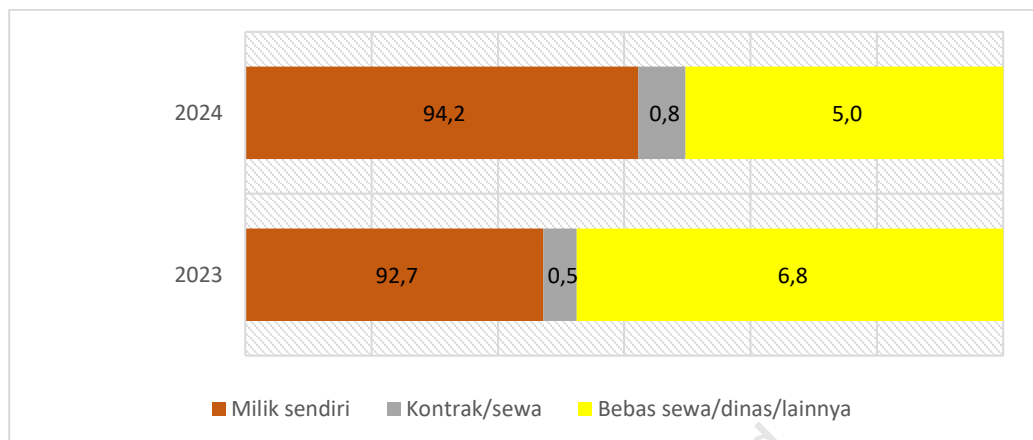
Sumber: Susenas

Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah menjadi indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Semakin baik tingkat kesejahteraannya maka semakin baik pula status kepemilikan rumahnya. Orang yang sejahtera lebih memilih memiliki rumah sendiri dibandingkan kontrak atau sewa. Bahkan, orang-orang dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi menjadikan rumah sebagai salah satu investasi mereka, bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan pokok. Hal tersebut membuat harga rumah terus melonjak setiap tahunnya.

Sekitar 94 persen rumah yang dihuni di Kabupaten Cilacap merupakan rumah milik sendiri. Persentase kepemilikan rumah sendiri di perkotaan lebih sedikit dibandingkan di wilayah perdesaan. Hal tersebut masih berkaitan dengan tingginya harga perumahan khususnya di wilayah perkotaan Cilacap. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah, banyak yang lebih memilih kontrak atau sewa. Banyaknya pekerja pendatang di perkotaan Cilacap juga mendorong kebutuhan perumahan yang bersifat sementara yaitu dengan kontrak atau sewa. Mega proyek yang ada di Cilacap seperti: kilang minyak Pertamina dan PLTU Kesugihan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pekerja pendatang bahkan pekerja asing untuk tinggal di Cilacap selama proyek berlangsung. Sehingga persentase rumah kontrak/sewa semakin meningkat setiap tahunnya.

Gambar 6.4 Status kepemilikan rumah di Kabupaten Cilacap tahun 2023-2024



Sumber: Susenas

KEMISKINAN CILACAP

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 menurun, begitu pula dengan persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 mencapai 186 ribu jiwa atau sekitar 10,68 persen dari total penduduk Cilacap. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 adalah angka kemiskinan sebesar 7,43 persen sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cilacap masih harus berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan.

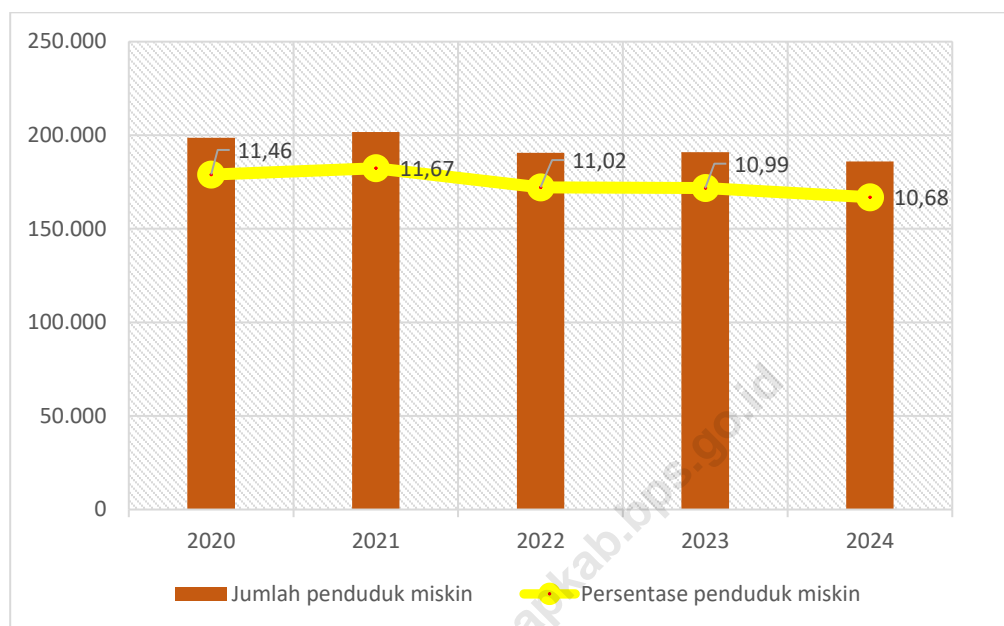


Sumber gambar: VectorStok.com

Perkembangan Penduduk Miskin

Pembangunan adalah suatu upaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Salah satu agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah pengurangan kemiskinan. Kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik yang berbentuk makanan maupun non makanan. Untuk mengukur kemiskinan secara makro, BPS mengadakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan setiap tahunnya sampai dengan level kabupaten/kota. Dari survei tersebut akan didapatkan indikator-indikator untuk mengukur kemiskinan seperti: jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

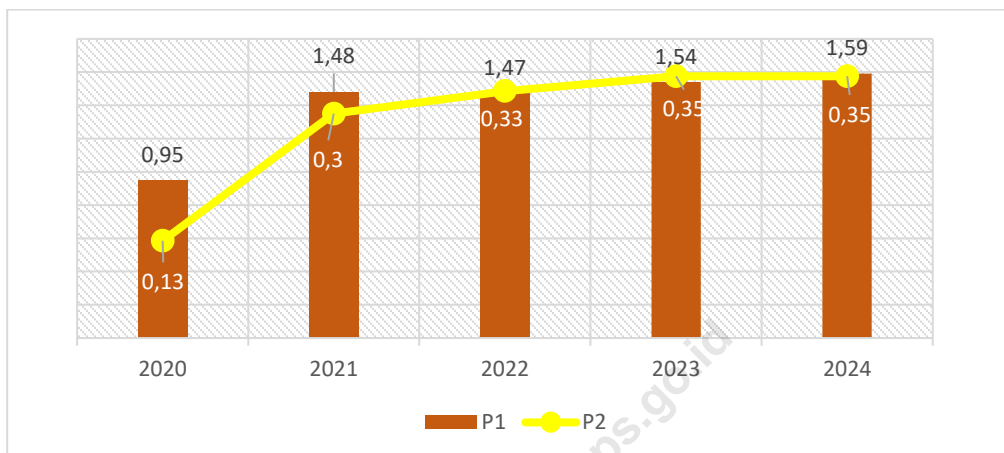
Gambar 7.1 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap 2020-2024



Sumber: Susenas

BPS menggunakan indikator Garis Kemiskinan (GK) dalam menentukan kemiskinan secara makro. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan. Kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Kebutuhan nonmakanan meliputi: perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. begitu pula sebaliknya. Garis kemiskinan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Cilacap 419 ribu rupiah kemudian meningkat dan berada pada posisi 441 ribu rupiah pada tahun 2024. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup masyarakat dengan mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) juga turut mendorong peningkatan garis kemiskinan.

Gambar 7.2 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Cilacap. 2020-2024



Sumber: Susenas

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan kata lain, semakin kecil nilai indeks maka semakin baik kondisi penduduk miskin. Nilai kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Cilacap pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penduduk miskin karena terjadinya kelesuan ekonomi global di tahun 2024.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin rendah nilai indeks maka semakin kecil pula ketimpangan diantara penduduk miskin. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Cilacap bergerak turun signifikan mulai tahun 2019. Namun, kembali meningkat pasca pandemi covid-19 sampai dengan tahun 2024 yang mulai bergerak stabil pada angka 0,35 persen.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA

<https://cilacapkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap
Jl. Dr. Soetomo No 16 A Cilacap 53212
Telp. (0282) 534328, Fax. (0282) 535011
Homepage: <https://cilacapkab.bps.go.id>
E-mail: bps3301@mailhost.bps.go.id